

LANDASAN AKSIOLOGIS BAGI SISTEM PENDIDIKAN DI MASA DEPAN

The Axiological Foundation for National Educational System at The Future

Jirzanah

*Fakultas Filsafat
Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

Education always exists in the center of cultural concrete circumstances. It begins with studying from the past, creates the recent concrete circumstances and consciously arranges the future. Indonesia has had a value system based on the Indonesian culture itself, so that in the process of transformation, that value system will become the spirit of Indonesian people in the future. Accordingly, in this research, the critical evaluations about the national educational cores and objectives as formulated in Undang-Undang No. 2 tahun 1989 (Ordinance No. 2 year 1989) is arranged, in order to know their matching with the development of education in the future.

This research is a bibliographical study. Its data were collected from some bibliographical sources. The books investigated were those which studied the national education and Undang-Undang No. 2 tahun 1989 (Ordinance No. 2 year 1989) about National Educational System. Bibliographies on Philosophy of Culture, Pancasila (the Five Principles), Antropology and Value were used as materials for arranging the analysis of the axiological foundation for the National Educational System. The collected data were analyzed by using hermeneutical method. The elements of hermeneutical method are description, interpretation, and reflection. Descriptive method is used to find the cores or materials, and objectives of the National Educational System. The interpretative method is used to find the foundation of value, culture and axiology of the National Educational System. Lastly, the reflective method is used to critically arrange the axiological foundation for developing future global educational system.

The main result of this research showed that the axiological foundation for National Educational System was the ability of rationality having characteristic of freedom and creativity inspired by the value of Pancasila. The National Educational System as the actualization of Indonesian value and culture was on open system, that it would always be relevant with the development in both national and global scopes. The national Educational System has given the foundation and framework in the process of actualization for keeping its relevance with the exchange of time. National curriculum have determined the divisions of lesson/subject matter for keeping the national sight to grow in order the learners know the problems of Indonesian national struggle. Moreover, the national curriculum has also determined the determined of divisions of lesson for keeping the freedom and creativity to grow, so that the rational freedom and creativity will always be inspired by the value of Indonesian nationality, that is Pancasila.

I. PENGANTAR

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir abad ke duapuluh telah berkembang sangat cepat dan diduga akan berkembang semakin cepat pada abad ke duapuluh satu

nanti. Perubahan-perubahan yang sangat cepat tersebut akan menyulitkan perencanaan bagi pendidikan masa depan, karena gambaran tentang masa depan menjadi sulit

diramalkan. Kurikulum yang direncanakan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai bagi masa depan akan lebih bersifat spekulatif. Pendidikan masa depan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu bukan hanya menyiapkan lulusan yang sesuai, tetapi juga menyiapkan lulusan yang dapat menjadi transformator. Transformasi nilai-nilai lama ke dalam bidang pendidikan memerlukan landasan aksiologis, yaitu landasan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya modern. Transformasi nilai-nilai kebudayaan tradisional seharusnya diartikan sebagai perencanaan untuk memberi bentuk baru dan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kebudayaan modern. Kebudayaan pada masyarakat modern pada umumnya ditandai dengan menonjolkan rasionalitas dan kreatifitas. Landasan aksiologis diperlukan agar para lulusan tetap berkepribadian sesuai sistem nilai Indonesia, tetapi memiliki wawasan luas dengan penonjolan rasionalitas dan kreatifitas.

Pendidikan senantiasa berada di tengah suasana kongkrit kebudayaan. Pendidikan selalu berawal dengan belajar dari masa lalu, mewujudkan suasana kongkrit masa kini, dan secara sadar berproses dinamis mengikuti perkembangan waktu. Pendidikan merupakan rencana menyelenggarakan transformasi nilai-nilai masa lalu, tetapi bukan suatu reformasi yang mengandung arti pengulangan bentuk kebudayaan masa lalu. Nilai-nilai masa lalu ditransformasikan ke dataran nilai yang memperluas wawasannya itu dataran wawasan sebagai manusia yang terus berkembang.

Bangsa Indonesia telah memiliki suatu identitas budaya dan tata nilai, sehingga dalam proses transformasi akan menjadi jiwa dan ciri bagi pembentukan manusia dan masyarakat Indonesia di masa depan. Perencanaan pendidikan di masa depan memerlukan sikap kritis, yaitu dengan menghindarkan diri dari mengikuti nilai-nilai lama dan tradisi lama secara statis. Sikap kritis dimaksudkan sebagai semangat untuk kembali kepada nilai-nilai esensial manusia

yang ideal dan memperhatikan kebutuhan sebagai suatu bangsa yang masih terus berkembang.

Imam Barnadib (1994: 13) menjelaskan, bahwa pendidikan berkedudukan dialektik terhadap masyarakat, karena pendidikan selain menjadi bagian masyarakat juga mempengaruhi masyarakat, kemudian hasil pengaruh pada masyarakat itu mempengaruhi lagi pada pendidikan. Penjelasan ini dapat menunjukkan kedudukan pendidikan dalam hidup bermasyarakat. Pendidikan sebagai suatu sistem memperoleh masukan dari masyarakat sebagai supra sistem, tetapi juga memberikan hasil (keluaran) bagi masyarakat. Masyarakat sebagai supra sistem memberikan masukan berupa tata nilai, cita-cita, dan norma-norma kepada pendidikan. Pendidikan memberikan hasil (keluaran) berupa tenaga terdidik yang sangat berguna bagi kemajuan masyarakat.

Rumusan permasalahan pada penelitian ini ialah:

1. Apakah Sistem Pendidikan Nasional telah sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh tujuan pendidikan nasional kepada materi Pendidikan Nasional?
3. Apa jenis nilai-nilai yang menjadi landasan aksiologis bagi Sistem Pendidikan Nasional di masa depan?

Menurut kajian pustaka proses pendidikan mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi pengembangan intelektualitas dan fungsi pengembangan budaya. Fuad Hassan (1986: 39) berpendapat, bahwa pendidikan harus tetap merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan sebagai dua hal yang berkaitan erat. Pendidikan berlangsung dalam suatu iklim budaya, bahkan tak terlepas dari kebudayaan yang menjadi persemaian identitas bangsa. Pendidikan tanpa orientasi budaya akan menjadi gersang dari nilai-nilai keluhuran, sedangkan kebudayaan tanpa dukungan pendidikan yang terencana pada akhirnya akan memudar sebagai sumber nilai.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi telah mempermudah orang untuk saling berhubungan dan berpindah-pindah. Orang menjadi mudah mengikuti perkembangan dunia, bertukar gagasan, pengalaman dan pengetahuan melalui media komunikasi, bahkan juga melalui pergaulan langsung. Brameld (1957: 13) berpendapat, bahwa pendidikan berfungsi bukan hanya menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lama yang dianggap luhur, tetapi juga berfungsi dalam proses pengembangan dan pembaharuan. Nilai-nilai budaya yang harus ditanamkan pada anak didik itu harus relevan dengan kurun waktu masa depan, yaitu masa berperan bagi anak didik.

Koentjaraningrat (1987: 135) berpendapat, bahwa modernisasi bukanlah westernisasi. Modernisasi semula memang lahir di Barat, tetapi tidak berarti jika bergaya hidup Barat adalah modern. Modernisasi bukan merupakan perubahan yang hanya terbatas pada penjiplakan gaya hidup Barat, melainkan suatu perubahan yang didasarkan pertimbangan kebebasan dan rasionalitas untuk mewujudkan masa depan yang ideal.

Pranarka (1991: 82) berpendapat, bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal penguasaan peradaban yang sekarang telah menjadi peradaban global atau peradaban dunia, yaitu ekonomi termasuk sistem moneter, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bangsa Indonesia harus mengejar keteringgalan itu tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kebangsaan Indonesia sendiri.

Pendidikan yang modern berarti pengembangan pendidikan untuk mewujudkan sistem pendidikan ideal yang sesuai dengan kemajuan jaman, yaitu sistem pendidikan yang bercirikan kebebasan dan rasionalitas. Sistem Pendidikan Indonesia yang modern tentunya juga suatu sistem pendidikan yang ideal bagi bangsa Indonesia, yaitu suatu Sistem Pendidikan Indonesia yang bercirikan kebebasan dan rasionalitas yang dijiwai oleh tata nilai yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia.

Suyata (1980: 6) berpendapat, bahwa pendidikan nasional berkaitan dengan pembentukan pribadi dan bagi kehidupan bersama. Pendidikan nasional mencakup aspek-aspek kehidupan yang bermacam-macam, sehingga mempunyai fungsi multi guna. Pendidikan Nasional diselenggarakan bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Wisnu Trihanggoro (1994: 49) menjelaskan, bahwa persoalan tentang nilai dan penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan. Manusia hidup dan bertumbuh dalam suatu lingkungan budaya. Konsep nilai dan penilaian dapat muncul dari tradisi suatu budaya atau hasil proses pendidikan, namun sebenarnya ada ukuran yang penting untuk diperhatikan, yaitu nilai-nilai kebudayaan. Pemahaman atas nilai-nilai kebudayaan sangat membantu pemahaman terhadap konsep ukuran yang akan diterapkan untuk menilai suatu kebijaksanaan.

II. CARA PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan dari karya-karya kepustakaan. Buku utama yang diteliti adalah buku-buku tentang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karya-karya para penulis lain di bidang Filsafat Kebudayaan, Filsafat Pancasila, Filsafat Manusia, dan Filsafat Nilai, dijadikan bahan untuk menyusun analisis tentang landasan aksiologisnya.

Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika untuk menganalisis data dengan unsur-unsur sebagai berikut.

- Metode deskripsi. Metode ini digunakan untuk menemukan latar belakang isi atau materi dan tujuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- Metode Interpretasi. Metode ini digunakan untuk menemukan landasan nilai, landasan budaya, dan landasan aksiologis Sistem Pendidikan Nasional.
- Metode Refleksi. Metode ini digunakan untuk secara kritis menyusun landasan

aksiologis bagi perkembangan pendidikan di masa depan dalam kancah globalisasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan yang dijadikan landasan bagi lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 ditentukan oleh rumusan tentang hakikat pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagai berikut.

Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam perwujudan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No. 2 Tahun 1989, bagian menimbang).

Rumusan yang tercantum dalam "menimbang" dari Undang-Undang tersebut mengandung makna:

- a. Pendidikan adalah bagian terpadu dari sistem sosial, negara, dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bukan hanya mencerdaskan sekelompok orang atau segolongan orang adalah tugas usaha pendidikan nasional.
- c. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan bukan mempertahankan kualitas yang telah dimiliki manusia Indonesia adalah tugas pendidikan nasional.
- d. Kemampuan warganegara untuk mengembangkan dirinya adalah landasan perlunya diselenggarakan upaya pendidikan nasional.

Pasal 4 tentang tujuan pendidikan nasional menggariskan sebagai berikut.

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,

memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Rumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas menunjukkan betapa besar tanggung jawab pendidikan nasional. Pendidikan nasional diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, mutu kehidupan, dan martabat manusia Indonesia. Pendidikan nasional diharapkan menghasilkan manusia terdidik yang utuh, baik keimanan, budi pekerti, pengetahuan, ketrampilan, kepribadian, dan rasa tanggung jawab.

Soedijarto (1993: 39) berpendapat, bahwa pelaksanaan sistem pendidikan nasional sebagai implementasi UU No. 2 Tahun 1989 dihadapkan kepada tantangan, tuntutan, dan masalah sebagai berikut.

1. Tuntutan untuk mengembangkan fungsi pendidikan sekolah sebagai lembaga pengembang kemampuan peserta didik secara utuh dan optimal dan bukan hanya sebagai lembaga pemilih dan pemilah.
2. Tuntutan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, baik dalam keimanannya, kepribadiannya, maupun rasa tanggung jawabnya.
3. Masalah masih terdapatnya kesenjangan antara tuntutan dan kenyataan, khususnya dalam segi mutu pendidikan.
4. Tantangan untuk mengembangkan program pendidikan yang mampu melayani populasi peserta didik yang heterogen secara merata dan bermutu.
5. Tantangan untuk menyiapkan dan mengembangkan program pendidikan yang mampu menyiapkan peserta didik menghadapi masyarakat maju di masa yang akan datang.

Pelaksanaan sistem pendidikan nasional sebagai implementasi UU No. 2 Tahun 1989 merupakan tantangan utama dalam menghadapi dan memasuki abad 21. Permasalahan yang harus dipikirkan adalah penyusunan landasan bagi strategi pengem-

bangun dan pelaksanaan sistem pendidikan yang memiliki kemampuan untuk menyiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan di masa depan, atau era lepas landas. Generasi yang pada saat ini masih berada di bangku sekolah, baik dasar, menengah, maupun perguruan tinggi adalah generasi yang akan mengisi dan memimpin masyarakat dalam era tinggal landas.

UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 37 menyebutkan kaidah sebagai berikut.

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing pendidikan

Ketentuan di atas berlaku bagi proses penyusunan kurikulum untuk semua jenis dan jenjang satuan pendidikan. UU No. 2 Tahun 1989 mengenal tiga jenjang pendidikan: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang lebih rendah merupakan persiapan bagi pendidikan yang lebih tinggi dan sekaligus sebagai persiapan memasuki dunia kerja.

Pemahaman tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan, serta tugas setiap jenjang pendidikan perlu dianalisis, sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik pada tingkatan pendidikan tertentu dalam berbagai kemampuan, sikap yang perlu dikuasai, dan dicapai setiap anak didik, sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat anak meninggalkan sekolah. Pemahaman yang mendalam tentang tingkat kematangan peserta, terutama kemampuan dan daya tahan belajarnya, dan gambaran yang jelas tentang tuntutan masyarakat di masa depan adalah dimensi kedua yang harus dijadikan kerangka acuan dalam perencanaan kurikulum. Pemahaman terhadap fungsi dan tujuan pendidikan nasional, tugas pendidikan dari jenjang pendidikan yang direncanakan

kurikulum, karakteristik, dan tingkat kematangan peserta didik, gambaran tentang tuntutan kehidupan masyarakat yang akan dimasuki peserta didik akan menentukan rumusan kemampuan-kemampuan dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, yang biasanya disebut tujuan institusional suatu jenjang pendidikan.

Tujuan institusional yang cukup operasional akan dijadikan sarana untuk memilih dan menentukan komposisi bidang studi dan perbandingan bobot perannya. Analisis pokok yang perlu diperhatikan dalam menentukan komposisi dan perbandingan bidang studi adalah:

- a. Menentukan bidang-bidang studi yang paling sesuai untuk dijadikan objek belajar peserta didik agar dapat dikuasai berbagai kemampuan intelektual dan sikap yang telah disepakati sebagai tujuan institusional
- b. Menentukan bobot perbandingan peranan antara berbagai bidang studi untuk mencapai kemampuan intelektual dan sikap yang telah ditetapkan
- c. Menentukan jumlah bidang studi yang secara efisien dan efektif dapat dipelajari peserta didik dalam suatu satuan program kurikulum
- d. Menentukan tata urutan penyajian bidang studi agar secara progresif berkesinambungan membantu peserta didik menguasai berbagai kemampuan intelektual dan sikap yang diharapkan.

Dua prinsip yang perlu dipegang dalam memilih dan menentukan isi disiplin ilmu pengetahuan yang perlu dijadikan materi pelajaran:

1. Isi yang dipilih hendaknya mewakili hakikat sesuatu disiplin ilmu sebagai cara memandang (landasan ontologis), cara berpikir (landasan epistemologis) suatu disiplin ilmu dalam menghadapi kenyataan.
2. Jumlah pokok bahasan yang dipilih untuk setiap mata pelajaran, sesuai dengan waktu yang tersedia, kemampuan, serta daya tahan belajar peserta didik, sehingga

dapat terjadi proses belajar yang secara epistemologis dan metodologis, dan bersifat relevan.

Proses belajar mengajar yang sekaligus merupakan bagian dari proses sosialisasi dan kulturalisasi yang relevan dengan tujuan pendidikan bukan merupakan bentuk interaksi guru - peserta didik yang sederhana dalam bentuk guru menjelaskan atau mendektekan dan peserta didik mencatat dan selanjutnya menghafal. Sekolah tidak akan lebih dari hanya lembaga penyaji informasi, apabila proses belajar-mengajar yang terjadi hanya sekedar mendekte dan menghafal, sehingga sukar diharapkan lahirnya generasi muda terdidik yang berkualitas seperti yang dicita-citakan oleh UU No.2 tahun 1989. Pengembangan kemampuan berpikir rasional, kepribadian, dan rasa tanggungjawab, perlu dikembangkan suatu proses belajar yang memenuhi persyaratan. Soedijarto (1993 : 53) menyebutkan syarat-syarat proses belajar-mengajar yang mampu menumbuhkan kemampuan berpikir rasional sebagai berikut :

1. Secara epistemologis relevan dengan tujuan pendidikan
2. Secara metodologis dapat menjamin urutan program untuk mencapai tujuan pendidikan
3. Secara aksiologis dapat ditunjukkan nilai-nilai yang harus diinternalisasikan
4. Secara kultural mengandung nilai-nilai yang dicita-citakan
5. Secara ekonomis efisien bagi pencapaian tujuan pendidikan

Relevansi epistemologis merupakan prinsip dalam pemilihan jenis proses belajar-mengajar, yaitu menolak usaha memitaskan ilmu pengetahuan, melainkan mengharap agar dalam proses belajar-mengajar peserta didik memahami alasan suatu prinsip atau konsep, serta menghayati ilmu pengetahuan sebagai suatu proses, bukan hanya sebagai hasil. Menghafal tanpa pemahaman akan menghasilkan peserta didik dengan segudang pengetahuan yang dihafalkan, dikhawatirkan

tidak akan mencapai sasaran pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penguasaan ilmu pengetahuan harus diartikan sebagai kemampuan menggunakan masalah yang relevan, sedangkan yang dapat menyumbang bagi peningkatan kecerdasan bangsa harus meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dalam arti kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penerapan antara satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya tidak akan sama, baik dalam kedalaman maupun intensitas. Proses belajar-mengajar yang demikian membutuhkan waktu lebih lama. Mahasiswa perlu banyak dilatih melalui penugasan terstruktur, dan berdiskusi tentang materi penugasan tersebut.

Relevansi metodologis pada hakikatnya merupakan perluasan dari relevansi epistemologis. Relevansi metodologis berangkat dari pemahaman hakikat berpikir rasional yang selalu berorientasi kepada pemecahan masalah. Manusia berpikir karena dihadapkan kepada kesulitan yang harus dipecahkan. Fungsi pendidikan sekolah adalah mengembangkan kemampuan kreatifitas berpikir rasional seperti kemampuan mengadakan hubungan timbal balik, yang artinya bahwa proses belajar yang dikembangkan untuk dihayati peserta didik hendaknya selalu berorientasi kepada pemecahan masalah secara berjenjang.

Relevansi aksiologis merupakan prinsip dalam pemilihan proses belajar yang dianjurkan agar peserta didik dalam proses mempelajari pengetahuan dapat memperoleh pengalaman tentang keterkaitan konsep atau prinsip yang dipelajari dengan praktek kehidupan nyata. Peserta didik dibimbing berfikir rasional yang sekaligus bertanggungjawab bagi kemajuan masyarakat.

Setiap konsep adalah alat untuk memahami atau memecahkan suatu masalah agar peserta didik dapat mengalihkan pengetahuannya untuk menghadapi masalah dalam kehidupan di kemudian hari. Proses belajar

yang dipilih hendaknya sekaligus memberikan gambaran tentang penggunaan suatu konsep ilmu pengetahuan dalam konteks yang nyata.

Relevansi kultural merupakan perluasan dari relevansi aksiologis. Sekolah diharapkan melaksanakan proses sosialisasi dan kulturalisasi nilai-nilai yang dicita-citakan ke dalam diri peserta didik, sehingga situasi belajar-mengajar di kelas seyogyanya dan seharusnya mengandung nilai-nilai yang diharapkan. Sikap mandiri, rasa tanggung jawab, disiplin, dan rasa kesetiakawanan bukanlah nilai-nilai yang dapat diajarkan, melainkan nilai-nilai yang perlu dihayati dalam keseluruhan proses belajar-mengajar. Bentuk proses belajar-mengajar dapat direncanakan baik dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa, sejarah, maupun dalam Pendidikan Pancasila, serta agama. Internalisasi nilai-nilai hendaknya tidak dirasakan sebagai suatu kepentingan peserta didik dan lembaga yang diwakili, melainkan terkandung di dalam setiap bentuk hubungan belajar-mengajar seperti pemberian tugas, suasana kelas yang dialogis, latihan diskusi, dan sistem pemberian nilai.

Relevansi kultural akan memperjelas relevansi landasan aksiologis bagi Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Sistem Pendidikan Nasional masa depan seharusnya bercirikan kemampuan berpikir rasional yang dijiwai nilai-nilai kultural Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila.

Bentuk proses belajar-mengajar akan dipandang secara ekonomis efisien apabila melalui suatu proses belajar tersebut dapat dicapai berbagai dimensi tujuan, baik kemampuan intelektual, nilai, dan sikap, maupun pengetahuan. Proses belajar dapat dipandang efisien apabila mengandung semua prinsip relevansi, baik epistemologis, metodologis, aksiologis, maupun pandangan nilai-nilai yang perlu disosialisasikan melalui pendidikan sekolah.

Proses belajar yang berencana dan memenuhi keempat persyaratan tersebut di atas,

serta secara strategis dilaksanakan efisien dapat diharapkan tercapainya tujuan pendidikan nasional secara efektif.

Pengaruh jenis ujian terhadap cara belajar peserta didik perlu mendapat perhatian, karena pada umumnya peserta didik hanya akan mempelajari apa yang menurut pemikiran akan diujikan. Perubahan dalam sistem evaluasi akan mempengaruhi situasi pendidikan. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila sistem evaluasi yang dikembangkan relevan dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan, artinya bahwa tidak semua sistem evaluasi dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif. Penggunaan bentuk tes objektif pada setiap satuan pengajaran, baik satuan pelajaran, satuan bulanan, maupun satuan semester, akhir tahun pelajaran, dan akhir program satuan jenjang pendidikan tidak akan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang meliputi penguasaan kemampuan berpikir rasional, kepribadian, dan rasa tanggung jawab. Pandangan demikian tidak berarti bahwa bentuk tes objektif kurang baik, melainkan karena penyusunan tes objektif yang sempurna tidak mudah dilakukan. Tes objektif juga tidak dapat mengukur berbagai kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Penggunaan tes objektif hendaknya lebih dibatasi dan selalu diperkaya dan dilengkapi dengan berbagai bentuk penilaian yang lebih relevan dengan tujuan pendidikan nasional.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Pendidikan Nasional merupakan bagian dari sistem nasional, yaitu sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem Pendidikan Nasional didasari sistem nilai yang bersumber dari budaya Indonesia sendiri, sehingga tidak bebas nilai dan tidak bebas budaya. Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan berdasarkan konsep dasar nilai, wawasan dasar, dan cita-cita tentang pendidikan nasional, sehingga sistem tersebut merupakan tata proses aktualisasi konsep dasar nilai,

wawasan dasar, dan cita-cita tentang kehidupan berbangsa. Sebagai suatu tata proses, maka Sistem Pendidikan Nasional seharusnya bersifat dinamis dan kontekstual, artinya terbuka bagi tuntutan relevansi. Evaluasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional juga perlu memperhatikan tiga pertimbangan, yaitu seberapa jauh sudah mengaktualisasikan konsep dasar nilainya (aksiologisnya), wawasan dasar konseptualnya (epistemologisnya), dan seberapa jauh terbuka bagi tuntutan relevansinya.

Konsep dasar nilai (landasan aksiologis) bagi Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pancasila meliputi pengembangan aspek jasmaniah dan rohaniah sebagai diri pribadi maupun sebagai warga negara dalam wujud kehidupan yang maju, adil, dan makmur. Perwujudan konsep dasar nilainya, bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan manusia seutuhnya dalam arti beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Rumusan ini menunjukkan adanya konsep yang jelas dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan tidak hanya diorientasikan kepada ilmu pengetahuan, tetapi kepada kepribadian anak didik, kemanusiaan, kebudayaan, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan diorientasikan untuk membangun ketangguhan dan ketahanan bangsa dengan menguasai peradaban global, yaitu industrialisasi, ekonomi, sistem moneter, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai bagian dari kebudayaan bangsa.

Dasar wawasan pendidikan yang jelas memerlukan penjabaran dan aktualisasinya melalui perangkat-perangkat operasional, yaitu perangkat strukturnya, didaktiknya, dan pengembangannya. Perangkat struktur merupakan penjabaran nilai-nilai budaya Indonesia yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika. Mata pelajaran kewarganegaraan dan mata kuliah umum merupakan bagian kurikulum yang berorientasi ketunggalan. Lebih lanjut, mata pelajaran dan mata kuliah

keahlian dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan rasionalitas yang bercirikan kebebasan dan kreatifitas. Latar belakang pluralisme kebangsaan dan kebudayaan Indonesia juga menuntut pluralisme penyusunan kurikulum, maka sekolah dan perguruan tinggi swasta dapat berperan dalam rangka orientasi kebhinnekaan. Perguruan tinggi swasta dapat menjabarkan kekhususan kultural, religiusitas, dan kekhususan yang lain secara lebih leluasa, di samping tetap menyelenggarakan mata pelajaran umum dan keahlian yang baku.

Pendekatan Bhinneka Tunggal Ika juga diperlukan untuk menyusun perangkat didaktiknya. Pendekatan ini akan menentukan bagian-bagian dari kurikulum yang berorientasi ketunggalan dan yang berorientasi kebhinnekaan. Berdasarkan orientasinya tersebut akan dapat dirumuskan program-program yang berhubungan dengan bahan pelajaran, komposisi bahan, metodologinya, dan evaluasinya. Bahan pelajaran kewarganegaraan dan mata kuliah umum seperti Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan yang berorientasi ketunggalan memerlukan perangkat metodologinya yang sesuai, yaitu metode di bidang ilmu-ilmu Humaniora. Metode Sejarah, Sastra, dan Filsafat diperlukan untuk menumbuhkan simpati, empati, dan prediksi imajinatif-spekulatif bagi kepentingan orientasi ketunggalan hidup berbangsa dan bernegara. Di sisi lain mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang berorientasi kebhinnekaan memerlukan perangkat metodologi yang dapat menumbuhkan kemampuan rasionalitas yang bercirikan kebebasan dan kreatifitas yaitu metode ilmu-ilmu khusus yang dikembangkan oleh masing-masing cabang ilmu.

Kunci utama keberhasilan pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional sebagai proses budaya, proses kemasyarakatan, dan proses politik adalah etos budaya para guru dan dosen. Para guru dan dosen yang sesungguhnya menjadi pelaku dari proses pendidikan secara aktual. Para guru dan dosen yang se-

cara kreatif harus dapat mengaktualkan bahan-bahan pelajaran di dalam kehidupan masyarakat global yang majemuk dan multikultural. Para guru dan dosen harus memiliki landasan pelaksanaan kerja dengan wawasan nasional yang mendalam, mengetahui masalah dan medan perjuangan bangsa, tetapi sekaligus menguasai bahan-bahan pelajaran yang akan dibekalkan kepada para anak didik, memiliki kreatifitas dan adaptasi didaktikal.

Bangsa Indonesia perlu membuat suatu bangunan yang di bagian atas sebagai bangunan intelektual modern dengan dilandasi bangunan bawah yaitu sifat dasar dan proses epistemologis yang kuat. Substansi dari tujuan pendidikan seharusnya bersifat epistemologis yaitu mengembangkan kualitas penalaran, kualitas kecerdasan sekaligus kualitas ideologis dan kultural. Pembangunan bidang pendidikan sebagai masyarakat ilmiah memerlukan masukan-masukan yang tepat dari hasil penelitian ke-filsafatan.

DAFTAR PUSTAKA

Brameld, Theodore, 1955, *Philosophies of Education in Cultural Perspective*,

The Dryden Press, New York.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Undang Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta.

Fuad Hassan, 1986, *Mendekatkan Anak Didik bukan Menjauhkan*, Prisma No.2 Tahun XV.

Imam Barnadib, 1994, *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*, Andi offset, Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta.

Pranarka, 1991, *Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Membangun Sistem Pendidikan Nasional Kita*, dalam Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI, PT Grasindo, Jakarta.

Soedijarto, 1993, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Suyata, 1980, *Pendidikan Nasional*, YP. FIP. IKIP, Yogyakarta.

Wisnu Trihanggoro, 1994, "Penilaian Terhadap Kebudayaan", dalam *Jangan Tangisi Tragedi*, Kanisius, Yogyakarta.